

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Data kemiskinan di Indonesia, pada bulan maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Angka kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrument yang tepat dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan tersebut. [1]. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata masih belum cukup efektif dalam menggulangnya.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggulangnya ialah dengan meluncurkan program beras RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) yang sudah di jalankan sejak tahun 1998 yang bertepatan dengan terjadinya krisis moneter. [2]. Hal ini di kuatkan dengan instruksi presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang kebijakan perberasan. [3] Selain dengan meluncurkannya program beras Raskin, pemerintah juga menerepkan sistem zakat yang di kelola oleh Lembaga formal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ). Zakat ini adalah salah satu instrumen islami yang digunakan untuk pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Lembaga ini menampung dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat guna memenuhi kewajiban para penyumbang zakat. [4].

Dengan pendistribusiannya yang masih secara konvensional, baik program beras raskin maupun program Baznaz tidak dapat hindarkan masalah baru terjadi dari masalah tidak tepatnya sasaran masyarakat maupun tidak efisien serta efektif dalam menyalurkan bantuan beras tersebut. Selain itu, dalam penyaluran kepada masyarakat yang berhak mendapatkan beras ini, terkadang tidak tepat sasaran dan dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sering sekali beras yang disubsidi pemerintah ini dijual kembali hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi para pejabat-pejabat yang mengelolanya.